

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### 1. Buku-Buku

- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Bagir Manan, *Menegakan Hukum Suatu pencarian*, Asosiasi Advokat, Jakarta, Indonesia, 2009.
- Burhannudin A, Tayibnapis. *Administrasi Kepegawaian Suatu Tinjauan Analitik*, Jakarta, Pradnya Paramita. 1995.
- B. Siswanto Sastrohadiwiryo, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Pendekatan Admnistratif dan Operasional*. Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
- Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, Jakarta, 2013.
- C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005.
- E Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, cetakan keempat, Jakarta, 1957.
- Fakultas Hukum UIR, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, UIR Press, Jakarta, 2013.
- F.X. Oerip S. Poerwopoespito, *Mengatasi Krisis Manusia di Perusahaan*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Gouzali Saydam, *Kamus Istilah Kepegawaian*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta, 1997.
- Hardijanto, *Pembinaan Kepegawaian Dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Makalah disampaikan pada Diklatpim Tingkat II. LAN. Jakarta, 2003.
- IRP. Daulay, *Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. 2006.
- Jenedri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Logemann, diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkrego, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif, (Over de Theori Van Een Stelling Staatsrecht)*, Ikhtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1975.

Miftah Thoha, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, Kencana Press, Jakarta, 1999.

Muchsan, *Hukum Kepegawaian*, Raja Bina Aksara, Jakarta, 1982.

Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1988.

Musanef, *Manajemen Kepegawaian Di Indonesia*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 1996.

Dr. H. Suparto Wijoyo dan Prof. Dr. H. Prasetijo Rijadi, *Administrative Reform Pakde Karwo Birokrasi Itu Melayani*, Kencana, Jakarta, 2015.

Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 1999.

Pudja Pramana KA, *Ilmu Negara*, Graha Ilmu, 2009.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

S.F Marbun dan M. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987.

Soemarno Soedarsono, *Character Building Membentuk Watak*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2002.

Sastra Djatmika dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Djambatan, Jakarta, 1995.

Sri Hartini, dkk, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

## 2. Artikel dan Jurnal

W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2013.

## 3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepala daerah, wakil kepala daerah, dan pegawai negeri, yang akan menjadi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus mengundurkan diri.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian, Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No.58 Tahun 2013 Tentang Badan Kepegawaian Negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Perkara No. 41/PUU-XII/2014.

#### 4. Internet

Diakses melalui:

<http://seoulmate.dagdigdug.com/pengertianjabatan/> tanggal 22 Agustus 2016.

Diakses melalui:

<http://ilmukritis.wordpress.com/2012/02/28/definisi-pekerjaan-profesi-jabatan-dan-karir/> Tanggal 24 Agustus 2016.

Diakses melalui:

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52f38f89a7720/pejabat-negara-dan-pejabat-pemerintahan> tanggal 26 Agustus 2016.

Diakses melalui:

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52f38f89a7720/pejabat-negara-dan-pejabat-pemerintahan>, tanggal 26 Agustus 2016.

Diakses melalui:

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11412> tanggal 27 Oktober 2016.

Diakses melalui:

<https://tifiacerdikia.wordpress.com/lecture/lecture-5/pendidikan-kewarganegaraan/konsep-negara-hukum/> tanggal 28 Oktober 2016.